

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman, Beberapa Aspek Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1983.
- Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III – Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV – Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ali Achmad Chomzah, Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.
- Ana Silviana, Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Hadjon M. Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung, 2004.
- Hutagalung, Arie Sukanti, Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 2005.

Irwan Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkota, Surabaya, 2003.

Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan, Jakarta: Margareta Pustaka, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2000.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991.

Sarjita, Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Sudjito, PRONA: Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Suhadi RofiWahanisa, Pendaftaran Tanah, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2008.

Utoyo, Sutopo, Masalah Penyalahgunaan Sertipikat Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya, Yogyakarta: Makalah pada Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat Dan Permasalahannya, 9 Juli 1992.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

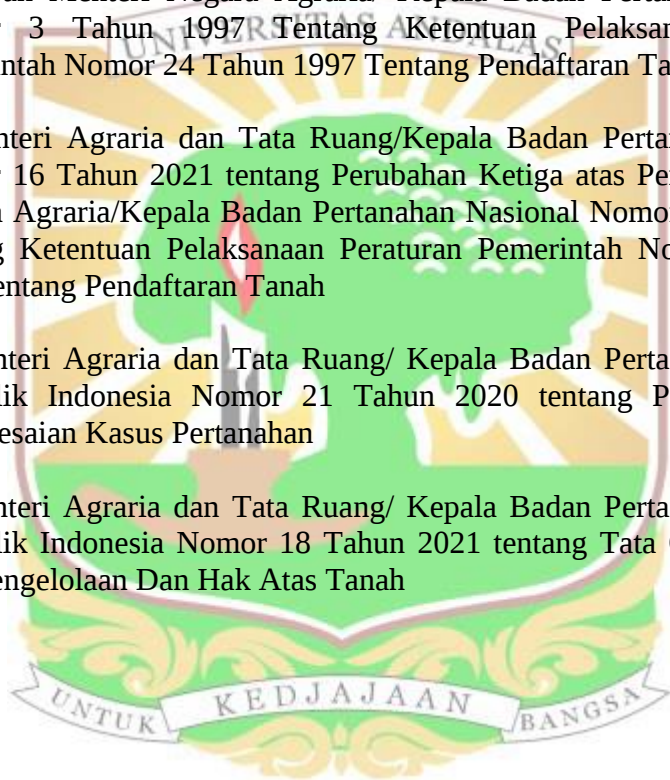
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah



LAMPIRAN

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 780 Tahun 2002 di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama Dana Pensiun Semen Padang, luas tanah 495 M².
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5910 Tahun 1990 di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atas nama Drs. Azwirman, luas tanah 495 M².

